



# Siaran Pers

Badan Kerja Sama Antar-  
Parlemen (BKSAP)  
DPR RI

Sekretariat:  
Ged. Nusantara III,  
Lt. 4Jl. Jend. Gatot  
Subroto Jakarta  
10270 Indonesia

Website:  
<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:  
[@bksapdprrri](https://twitter.com/bksapdprrri)

Instagram:  
[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

YouTube:  
[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP-DPR-RI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negaralain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut,  
silakan menghubungi Biro  
KSAP:  
021-5715814  
[biro\\_ksap@dpr.go.id](mailto:biro_ksap@dpr.go.id)

## DPR RI Dukung Penguatan Kerjasama AIPA - Parlemen Norwegia dalam Merespon Berbagai Tantangan Global dan Regional

Jakarta, Indonesia - Pandemi COVID-19 yang melanda berbagai negara di seluruh dunia saat ini menjadi pengingat bahwa kerjasama internasional yang berlandaskan pada prinsip kolaborasi dan solidaritas sangat diperlukan. Dalam merespon berbagai tantangan global maupun regional yang ada, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) sebagai satu-satunya organisasi antar-parlemen di ASEAN bersama-sama dengan Parlemen Norwegia (*Storting*) yang berstatus *Observer* pada organisasi AIPA mengadakan pertemuan daring bertajuk *AIPA-Norwegian Parliament Introductory Meeting* pada Jumat, 26 Februari 2021 yang dihadiri oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dr. Fadli Zon, M.Sc (F-Pgerindra), perwakilan masing-masing parlemen anggota AIPA, dan perwakilan Parlemen Norwegia (*Storting*) yang dipimpin oleh H.E. Elin Adgestein selaku *Head of Asia Delegation*.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara parlemen AIPA dengan Parlemen Norwegia (*Storting*) dalam merespon berbagai tantangan yang menjadi perhatian bersama kedua wilayah, yakni seputar pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, demokrasi, peran parlemen dalam merespon pandemi COVID-19 dan imbasnya terhadap kehidupan masyarakat, dan upaya anti korupsi.

Parlemen Norwegia (*Storting*) yang baru saja mendapatkan status sebagai *Observer* pada organisasi AIPA berharap bahwa pertemuan yang baru pertama kali dilakukan ini dapat mendorong kerjasama strategis yang berlandaskan prinsip *mutual understanding* antara AIPA dan Parlemen Norwegia (*Storting*), utamanya dalam topik kemaritiman, *green house gases*, dan upaya penguatan kolaborasi dalam kerangka regional.

"Norwegia adalah salah satu *partner* utama bagi Indonesia. Kerjasama bilateral yang telah terbangun selama ini dalam berbagai sektor dan melibatkan berbagai *stakeholders* menegaskan komitmen kedua negara yang menjunjung tinggi prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, salah satunya melalui kerjasama mengurangi emisi gas rumah kaca. Saya berharap, melalui keterlibatan Norwegia pada *framework* kerjasama regional AIPA, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan global maupun regional bersama-sama," ujar Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon, M.Sc dalam sambutannya.

Selaras dengan visi ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama (*Forging Ahead Together*), maka diharapkan kerjasama yang dibangun antara parlemen negara-negara ASEAN yang tergabung dalam AIPA dengan berbagai negara *observer* seperti Norwegia ini dapat memberi manfaat positif bagi seluruh pihak yang terlibat, utamanya dalam mencapai SDGs yang merupakan prioritas seluruh negara di berbagai belahan dunia saat ini. Selain itu, selaku Presiden *Southeast Asian Parliamentarians against Corruption (SEAPAC)*, Dr. Fadli Zon berharap AIPA dan Parlemen Norwegia (*Storting*) dapat melakukan lebih banyak dialog dan meningkatkan kerjasama strategis untuk mendukung keterbukaan dan transparansi sebagai salah satu upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.